

BUDAYA ETIS DAN KEBIJAKAN ANTI-KORUPSI DI PERBANKAN: STUDI KASUS ESG COMPLIANCE

Ella Ramadhanti^{1*}, Ayu Syafadan², Mareta Suwartini³

^{1,2,3}University of Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

¹ellaramadhanti33@gmail.com, ²ayusyafadan1404@gmail.com

³maretasuwartini@gmail.com

Received: 10-07-2025

Revised: 05-09-2025

Approved: 30-09-2025

ABSTRACT

Budaya etis dan kebijakan anti-korupsi memegang peranan penting dalam menjaga kepercayaan publik dan reputasi sektor perbankan. Melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR), artikel ini mengkaji bagaimana penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) mampu memperkuat budaya etis dan kebijakan anti-korupsi di bank-bank besar di Indonesia seperti BTN, BNI, dan Mandiri. Hasil kajian menunjukkan bahwa komitmen terhadap etika, pelatihan anti-korupsi yang berkelanjutan, serta penerapan sistem pengawasan internal yang ketat dapat menekan potensi kecurangan sekaligus meningkatkan kepercayaan nasabah. Integrasi ESG tidak hanya difokuskan pada aspek profitabilitas, tetapi juga membawa dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Temuan ini menegaskan bahwa menggabungkan unsur tata kelola yang baik, kepedulian sosial, dan kesadaran lingkungan menjadi langkah strategis untuk menciptakan perbankan yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan di masa depan.

Kata kunci: Budaya Etis, Kebijakan Anti-Korupsi, ESG, Perbankan.

PENDAHULUAN

Bank merupakan institusi keuangan yang berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana (unit surplus) dengan pihak yang memerlukan dana (unit defisit), sekaligus memfasilitasi kelancaran sistem pembayaran. Sebagai sektor yang sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat, penting bagi bank untuk menjaga kesehatan operasionalnya. Stabilitas lembaga perbankan memainkan peran penting dalam menjaga kestabilan perekonomian suatu negara. Stabilitas tersebut tidak hanya diukur berdasarkan jumlah uang yang beredar, tetapi juga oleh jumlah lembaga perbankan dalam sistem keuangan. Kesehatan bank sendiri mencerminkan kemampuan institusi keuangan dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan efektif dan memenuhi seluruh kewajiban sesuai regulasi perbankan. Evaluasi atas kondisi kesehatan bank pada akhirnya akan menunjukkan kinerja yang berhasil dicapai oleh bank tersebut. [1].

Budaya etis yang melawan korupsi dalam industri perbankan memiliki fungsi penting dalam membangun sistem keuangan yang jujur dan bertanggung jawab. Penerapan prinsip-prinsip etis yang kokoh bukan hanya bisa mencegah tindakan korupsi tetapi juga berperan dalam memperkuat kepercayaan masyarakat. Sementara itu, penerapan kebijakan anti-korupsi yang baik sangat membantu dalam meningkatkan kinerja keuangan lembaga perbankan [2]. Budaya adalah salah satu aspek yang menjadi fokus perusahaan atau organisasi untuk mencegah kecurangan. Pengendalian internal perlu dilakukan seefisien mungkin dalam sebuah organisasi untuk menghindari dan mencegah terjadinya kesalahan, kecurangan, serta penyelewengan. Dimana sistem pengendalian internal memiliki pengaruh langsung terhadap good governance sehingga

berimplikasi terhadap pencegahan kecurangan (Jayanti et al., 2024).

Korupsi, sesuai dengan penjelasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah penyalahgunaan atau penyimpangan dana negara (atau perusahaan dan lain-lain) untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Penjelasan ini menekankan bahwa korupsi merupakan tindakan yang secara langsung merugikan anggaran publik dan mengganggu sistem pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab [4]. Korupsi merupakan aspek dari tingkah laku sosial dalam suatu komunitas yang diakui dan dipahami sebagai tindakan-tindakan aneh, cenderung merugikan, dan bersifat negatif. Masyarakat memiliki beragam perspektif mengenai tindakan korupsi, meskipun terkadang ada pendapat yang kurang jelas, terutama jika tindakan tersebut dilakukan oleh individu atau kelompok dalam komunitas dengan status sosial tertentu Kristen & Wacana, (2024). Pentingnya tindakan pencegahan terhadap korupsi tidak bisa dianggap sepele. Di sejumlah negara, praktik korupsi telah menjalar ke berbagai bidang, mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga organisasi non-pemerintah. Hal ini menyebabkan berbagai konsekuensi, seperti berkurangnya kepercayaan masyarakat, terhambatnya investasi, dan kerusakan pada tatanan sosial serta ekonomi yang telah mapan [6].

Sebagaimana didefinisikan dalam UU No. 21 Tahun 2001, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 1999, korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Nahariah, (2024). Korupsi merupakan aspek dari tingkah laku sosial dalam suatu komunitas yang diakui dan dipahami sebagai tindakan-tindakan aneh, cenderung merugikan, dan bersifat negatif. Masyarakat memiliki beragam perspektif mengenai tindakan korupsi, meskipun terkadang ada pendapat yang kurang jelas, terutama jika tindakan tersebut dilakukan oleh individu atau kelompok dalam komunitas dengan status sosial tertentu Kristen & Wacana, (2024). Salah satu kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Pada saat krisis moneter 1997-1998, pemerintah memberikan BLBI kepada bank-bank yang mengalami kesulitan keuangan. Namun, para pejabat yang seharusnya bertanggung jawab justru menyalahgunakan dana tersebut. Kasus BLBI melibatkan sejumlah pejabat negara dan pengusaha yang diduga menyelewengkan dana dalam jumlah besar. Triliunan rupiah dana BLBI digunakan untuk memperkaya diri sendiri daripada membantu bank-bank yang dirugikan. Kasus ini meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan dan merugikan negara Mau, (2024). Pentingnya tindakan pencegahan terhadap korupsi tidak bisa dianggap sepele. Di sejumlah negara, praktik korupsi telah menjalar ke berbagai bidang, mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga organisasi non-pemerintah. Hal ini menyebabkan berbagai konsekuensi, seperti berkurangnya kepercayaan masyarakat, terhambatnya investasi, dan kerusakan pada tatanan sosial serta ekonomi yang telah mapan [6].

Membangun karakter yang kuat pada generasi muda adalah usaha penting untuk melawan korupsi. Generasi muda berperan penting dalam mewujudkan perubahan signifikan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, terbuka, dan berintegritas. Pendidikan mengenai anti korupsi muncul sebagai alat yang sangat penting untuk memberikan kepada generasi muda pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai integritas serta akibat buruk dari korupsi Riza & Barrulwalidin, (2024). Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam sektor perbankan sangat berperan dalam menjalankan aktivitas operasional bank. Perbankan merupakan lembaga yang

memperoleh kepercayaan dari masyarakat untuk mengelola dana, sehingga perlu adanya pengelolaan risiko yang sangat cermat untuk membangun citra positif di mata nasabah. Selain itu, fungsi utama perbankan adalah mengumpulkan dan menyimpan dana Anjani et al., (2023).

Tata kelola perusahaan yang baik (GCG) adalah dasar bagi industri perbankan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan kualitas layanan. Kepercayaan masyarakat umum, dan jaminan keberlanjutan jangka panjang. Tiga komponen utama tata kelola yang baik—transparansi, etika, dan kepatuhan regulasi—sangat penting untuk membangun sistem perbankan yang akuntabel, bertanggung jawab, dan berorientasi pada prinsip keberlanjutan (ESG — Environmental, Social, and Governance). Dengan meningkatnya kompleksitas transaksi keuangan global serta tuntutan dari regulator dan investor, bank harus semakin memperkuat sistem tata kelola mereka untuk mengurangi risiko operasional, mencegah skandal keuangan, dan menjamin kelangsungan bisnis Boitan, (2025). penerapan ESG juga mengakselerasi inovasi dan perbaikan dalam cara bisnis dijalankan. Perusahaan yang mengalokasikan dana untuk inisiatif yang berhubungan dengan lingkungan atau sosial biasanya menciptakan inovasi dalam produk atau proses yang dapat meningkatkan keefisienan operasional mereka atau memberikan keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Inovasi semacam ini tidak hanya memberi manfaat ekonomi bagi perusahaan, tetapi juga berdampak positif pada lingkungan serta komunitas di sekitar mereka [12].

Dengan meningkatnya pemahaman dunia mengenai isu-isu keberlanjutan yang semakin mendesak, ESG (*Environmental, Social, and Governance*) kini telah menjadi fokus utama yang tidak bisa diabaikan dalam dunia bisnis dan keuangan. Saat ini, ESG tidak hanya berperan sebagai cara untuk mematuhi regulasi yang ada atau untuk meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik, tetapi juga telah berkembang menjadi bagian yang sangat penting dari strategi bisnis yang lebih luas. Hal ini berpengaruh signifikan terhadap keberlangsungan jangka panjang sebuah perusahaan, karena semakin banyak investor dan konsumen yang mempertimbangkan kriteria keberlanjutan dalam pengambilan keputusan mereka. Dengan demikian, integrasi prinsip-prinsip ESG dalam operasional dan kebijakan perusahaan bukan hanya sekadar pilihan, melainkan suatu keharusan untuk memastikan daya saing dan relevansi di pasar yang terus berubah [13].

Prinsip *Environmental, Social, and Governance (ESG)* telah mendapat perhatian yang lebih besar dalam praktik bisnis dan investasi dalam beberapa tahun terakhir. Prinsip ESG telah mulai dimasukkan ke dalam praktik akuntansi sebagai bagian penting dari pengukuran dan pelaporan kinerja. Dalam Peraturan No. 51 tahun 2017 mengenai keuangan berkelanjutan atau Implementasi Keuangan Berkelanjutan bagi Institusi Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan keuangan berkelanjutan sebagai dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penyusunan Sistem Pengelolaan Bisnis yang mengintegrasikan elemen lingkungan, sosial, dan tentang tren penelitian terkini dan mengidentifikasi area penelitian yang masih belum terjamah mengenai pengungkapan ESG adalah penyelarasan ESG dalam konteks perbankan Mubin et al., (2023) .

TINJAUAN PUSTAKA

Budaya Etis

Budaya etika merujuk pada kumpulan nilai yang dipegang dan dijunjung tinggi oleh suatu organisasi. Ini mencerminkan pola pikir di mana individu menyadari pentingnya bertindak sesuai dengan hukum dan menghormati orang lain. Untuk membangun budaya etika, para pemimpin perlu memberikan teladan perilaku yang diharapkan serta memberikan penghargaan kepada karyawan yang menunjukkan perilaku tersebut. Upaya ini dapat dilakukan melalui kebijakan dan prosedur yang menegaskan harapan, serta melalui sesi pelatihan yang menjelaskan pentingnya etika, baik di dalam maupun di luar tempat kerja. [15].

Fungsi budaya sering kali tidak mudah dibedakan dari fungsi budaya dalam kelompok maupun organisasi, karena keduanya merupakan bagian dari fenomena sosial yang lebih luas. Dalam organisasi, budaya berfungsi sebagai pengarah perilaku individu di dalam perusahaan. Beberapa tipe budaya organisasi yang dikenal mencakup *adhocracy*, *clan*, *hierarchy*, dan *market*. Perusahaan seharusnya dapat menerapkan semua tipe budaya ini agar budaya etis dalam organisasi dapat terwujud dengan baik, tanpa mengesampingkan salah satunya. Dengan demikian, penerapan semua tipe tersebut sangat penting agar budaya etis di perusahaan dapat berjalan dengan efektif. [1].

Korupsi

Korupsi merupakan isu yang sangat kompleks dan multidimensional, serta perlu ditangani dengan serius. Penanganan ini sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan di sebuah negara. Fenomena korupsi ini tidak hanya masalah lokal atau nasional, tetapi telah menjadi isu global yang menyebar dan memengaruhi berbagai sektor kehidupan. Dampaknya mulai dirasakan dalam sistem pemerintahan, ekonomi, dan hukum, hingga mengganggu tatanan budaya politik suatu negara. Selain itu, korupsi memiliki hubungan yang sangat erat dan dapat merusak sektor perbankan. Bank, sebagai fondasi sistem keuangan, dapat berfungsi sebagai sarana strategis bagi pelaku korupsi untuk menyembunyikan, mentransfer, atau melegitimasi dana hasil tindak kejahatan mereka, seringkali melalui pencucian uang, yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan secara keseluruhan dan menghalangi aliran investasi yang krusial untuk pertumbuhan ekonomi [16].

ESG

ESG dapat diartikan sebagai sebagai arah masa depan bagi bisnis yang berkelanjutan. Di era yang serba modern ini, perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan, aspek sosial, dan tata kelola. Konsep ini dikenal dengan istilah ESG (*Environmental, Social, and Governance*), yang kini menjadi dasar yang sangat penting dalam praktik bisnis dan investasi. [17].

Dalam konteks industri perbankan, aspek ESG (*Environmental, Social, and Governance*) memiliki peranan yang sangat signifikan:

1. *Environmental* (Lingkungan): Bank perlu mengelola dampak lingkungan dari portofolio investasi mereka, mendukung proyek-proyek berkelanjutan, serta berupaya mengurangi emisi karbon dan limbah.
2. *Social* (Sosial) : Bank memiliki tanggung jawab untuk menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat, melindungi hak asasi manusia, menciptakan kondisi kerja yang adil, dan berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan

(CSR).

3. *Governance* (Tata Kelola) : Praktik tata kelola yang baik sangat penting, mencakup manajemen risiko, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan. Hal ini membantu membangun kepercayaan dari nasabah dan investor serta mengurangi risiko reputasi.

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ESG, perusahaan perbankan dapat meningkatkan kinerja keuangan mereka sekaligus berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR), yaitu pendekatan sistematis dan terstruktur yang dirancang untuk mengumpulkan serta mengevaluasi literatur yang relevan dengan fokus kajian tertentu [18]. Metode ini memiliki keunggulan dalam mengidentifikasi, menganalisis, menilai, serta menginterpretasi berbagai hasil penelitian yang tersedia secara komprehensif, dengan titik berat pada topik atau fenomena tertentu yang sedang diteliti [19]. Beberapa definisi mengenai SLR telah dikemukakan oleh para peneliti, di antaranya sebagai berikut:

- a. SLR merupakan metode untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasi seluruh penelitian yang relevan dengan fokus pada pertanyaan riset tertentu, suatu bidang studi, atau fenomena yang menjadi perhatian.
- b. SLR dipandang sebagai pendekatan berbasis bukti yang bertujuan untuk menemukan studi yang relevan guna menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, melalui proses seleksi, penilaian, dan sintesis hasil temuan.
- c. SLR juga didefinisikan sebagai teknik riset yang digunakan untuk menganalisis perkembangan terkini dalam suatu disiplin ilmu, yang mencakup perumusan masalah, penentuan sumber informasi, string pencarian, serta kriteria inklusi dan eksklusi. Proses ini juga dapat melibatkan analisis kuantitatif serta penggunaan templat khusus untuk ekstraksi data dari dokumen yang ditemukan.
- d. Di bidang Rekayasa Perangkat Lunak, SLR digunakan sebagai metode untuk mengkaji serta mengidentifikasi isu-isu yang muncul dalam disiplin tersebut.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan pengelolaan bahan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan cara mencari data dari perpustakaan, membaca dan mencatat informasi, serta menelaah jurnal-jurnal yang relevan. Salah satu metode yang digunakan adalah tinjauan literatur sistematis atau *Systematic Literature Review* (SLR), yang berfungsi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menafsirkan hasil dari berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Proses SLR melibatkan langkah-langkah seperti mengkategorikan, mengumpulkan, dan menganalisis temuan-temuan penelitian terkait penerapan etika bisnis dalam pengambilan keputusan yang bersifat etis. Metode SLR ini memanfaatkan berbagai aplikasi online, termasuk *Google Scholar*, *Mendeley*, dan platform digital lainnya untuk mendukung pencarian dan pengumpulan data.



Gambar 1. Alur Bagan Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

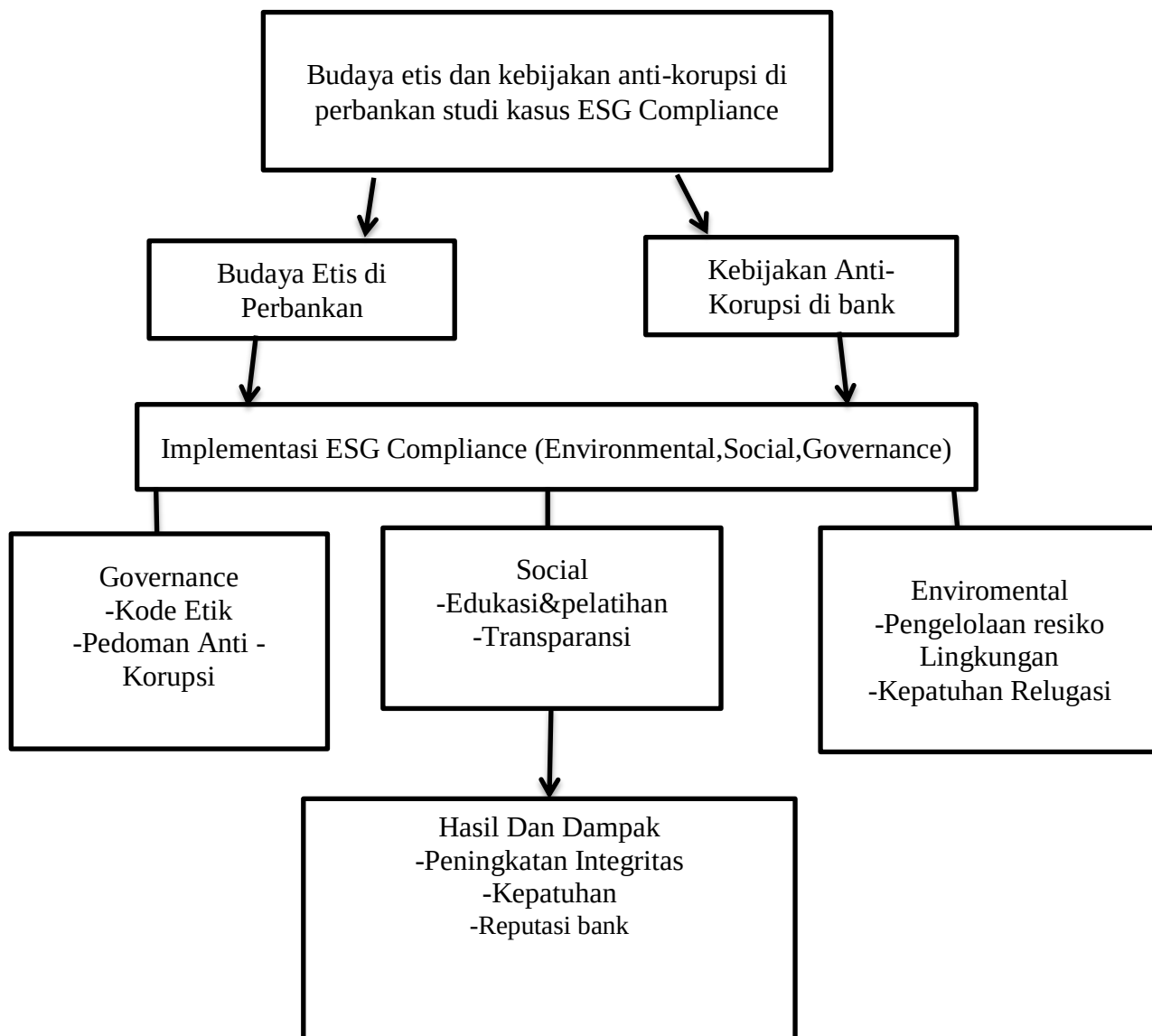
Di sektor perbankan, budaya etis memiliki peranan yang sangat penting dan krusial untuk mempertahankan kepercayaan serta integritas yang diperlukan dalam hubungan antara bank dan nasabahnya. Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan dengan jelas bahwa penerapan prinsip-prinsip etika yang kuat, seperti komitmen yang tinggi kepada nasabah, transparansi dalam setiap transaksi, serta tata kelola yang baik dan akuntabel, dapat secara signifikan menekan tingkat kecurangan yang mungkin dilakukan oleh pegawai dan pada saat yang sama meningkatkan reputasi bank di mata publik. Nilai-nilai etika yang kokoh dan terinternalisasi dengan baik sangat penting dalam upaya mengurangi praktik-praktik fraud dan korupsi yang dapat merugikan tidak hanya bank itu sendiri tetapi juga nasabah dan masyarakat luas. Selain itu, budaya etis yang baik mencakup berbagai elemen moral dan akhlak yang berakar pada norma-norma agama dan sosial yang berlaku, seperti yang terlihat dalam praktik perbankan syariah, yang secara khusus menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan kewajiban sosial terhadap sesama, sehingga menciptakan lingkungan perbankan yang lebih sehat dan berkelanjutan. [20].

Untuk mencegah dan menangani praktik korupsi yang dapat merugikan sektor perbankan, sangat penting untuk menerapkan kebijakan anti-korupsi yang komprehensif, yang mencakup berbagai elemen seperti kode etik yang jelas, pedoman perilaku yang terperinci, pelatihan anti-korupsi yang rutin, sistem pelaporan pelanggaran yang aman dan efektif (*whistleblower*), serta penguatan kontrol internal yang ketat. Bank-bank besar di Indonesia, seperti Bank Mandiri, telah mengambil langkah-langkah proaktif dengan memiliki kode etik bankir dan kode etik profesi yang secara khusus menekankan pentingnya tanggung jawab, keadilan, dan integritas moral dalam setiap aspek operasi sehari-hari mereka. Dengan menerapkan kebijakan ini secara konsisten dan berkelanjutan, bank-bank tersebut dapat secara signifikan mengurangi risiko terjadinya fraud dan pada saat yang sama meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, sehingga menciptakan lingkungan perbankan yang lebih transparan dan akuntabel. [21].

BTN secara aktif membangun dan mengembangkan budaya etis yang kuat di dalam organisasi dengan cara memastikan bahwa semua karyawan, tanpa terkecuali, menerima pelatihan yang teratur dan menyeluruh mengenai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang sangat penting untuk diterapkan dalam setiap aspek operasional. Selain itu, BTN juga menerapkan sistem yang dirancang khusus untuk

melindungi dan mencegah terjadinya praktik-praktik yang tidak etis, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel. Melalui program Kesadaran Budaya yang inovatif, BSI berupaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam kerangka *Environmental, Social, and Governance* (ESG), serta memastikan bahwa etika bisnis tidak hanya menjadi teori, tetapi juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari operasi sehari-hari mereka, sehingga menciptakan budaya kerja yang berlandaskan pada nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial. [22]. Bank BUMN (seperti BTN dan BNI) lebih banyak mengungkapkan praktik etis daripada bank swasta, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas.

Berbagai masalah utama, seperti penerapan praktik lingkungan hidup yang kemandirian, tanggung jawab sosial, dan tata kelola bisnis yang baik di sektor perbankan Indonesia [23].



Penjelasan Grafik

- a. Budaya Etis Diperbankan, meliputi penerapan prinsip integritas dan etika kerja yang kuat, seperti yang ditunjukkan oleh BNI melalui pelatihan anti-korupsi, Kode Etik, dan Pedoman Benturan Kepentingan [24]
- b. Kebijakan Anti Korupsi, melibatkan kebijakan formal, pelatihan karyawan, sistem pengawasan internal, dan perlindungan whistleblower untuk melindungi perbankan dari korupsi

Dalam konteks ESG Compliance, yang terdiri dari tiga pilar utama yang saling berkaitan, yaitu *governance* (tata kelola), *social* (aspek sosial), dan *environment* (lingkungan), kedua elemen ini diintegrasikan secara holistik untuk menciptakan kerangka kerja yang komprehensif. Perbankan di Indonesia, termasuk institusi besar seperti BTN, BNI, dan Mandiri, secara aktif menerapkan prinsip-prinsip ESG dalam berbagai aspek operasional mereka, terutama dalam hal pengelolaan risiko yang cermat, pelaporan yang transparan, serta pengembangan kebijakan yang mendukung keberlanjutan dan upaya anti-korupsi. Dengan demikian, mereka tidak hanya berfokus pada profitabilitas, tetapi juga berkomitmen untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, serta memastikan bahwa praktik bisnis mereka sejalan dengan nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial yang lebih luas. [25].

Kesesuaian dengan ESG (*Environmental, Social, Governance*) telah menjadi kerangka kerja yang semakin penting dan relevan bagi sektor perbankan untuk menjalankan bisnis yang tidak hanya bertanggung jawab, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang. Dalam upaya untuk mengurangi risiko pelanggaran etika dan korupsi yang dapat merugikan reputasi dan operasional bank, pilar kepemimpinan ESG sangat terkait erat dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, yang mencakup penerapan budaya etis yang kuat serta kebijakan anti-korupsi yang efektif. Bank-bank yang menerapkan prinsip-prinsip ESG secara efektif dan konsisten akan memiliki sistem pengendalian internal yang tidak hanya kuat dan transparan, tetapi juga menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap praktik bisnis yang berintegritas dan bertanggung jawab. Selain itu, elemen sosial dan lingkungan yang terdapat dalam kerangka ESG berperan penting dalam membantu membangun budaya kerja yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepuasan karyawan dan kepercayaan nasabah, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar mereka.

Penelitian ini menunjukkan bahwa budaya etis mampu menekan tingkat kecurangan dan meningkatkan reputasi bank. Studi kasus pada bank BUMN (BTN, BNI, Mandiri) menunjukkan penerapan pelatihan, kode etik, dan penguatan tata kelola sebagai upaya nyata membangun budaya etis. Kebijakan Anti-Korupsi mengacu pada temuan literatur terkait penerapan kebijakan formal, pelatihan anti-korupsi, sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblower*), dan penguatan kontrol internal. penelitian ini disesuaikan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan betapa pentingnya menggabungkan elemen tata kelola, sosial, dan lingkungan dalam operasional perbankan. Kerangka kerja ESG compliance digambarkan sebagai fokus pada dampak sosial dan lingkungan serta profitabilitas. Dalam sintesis literatur, implikasi teoritis dan praktis dari penelitian ini dijelaskan sejalan dengan tujuan SLR untuk memberikan gambaran yang lengkap dan berbasis bukti.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa budaya etika dan kebijakan anti-korupsi bukan sekadar pelengkap, melainkan merupakan dasar yang krusial untuk menciptakan perbankan yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. Mengintegrasikan prinsip ESG memungkinkan bank untuk memperkuat pengawasan internal, menciptakan citra positif, serta mengurangi risiko pelanggaran etika dan korupsi. Bank-bank BUMN di Indonesia, seperti BTN dan BNI, terbukti lebih proaktif dalam mengimplementasikan pelatihan etika, kode etik, dan sistem pengawasan yang terbuka dibandingkan bank swasta. Dengan menekankan bahwa keuntungan finansial harus seiring dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sektor perbankan dapat membangun nilai tambah jangka panjang yang memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk nasabah, karyawan, dan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Rosliana, "Pengaruh pengendalian internal dan budaya etis organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Perbankan di Pekanbaru," *J. Akunt. dan Keuang.*, vol. 7, no. 1, pp. 1–8, 2018.
- [2] F. A. Siregar, "Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Perbankan," *J. Hukum, Polit. Dan Ilmu Sos.*, vol. 2, no. 1, pp. 236–252, 2023, doi: 10.55606/jhps.v2i1.1457.
- [3] A. A. I. D. Jayanti, R. P. Suci, and N. Mas, "Peran Pemahaman Good Corporate Governance Dalam Memediasi Pengaruh Budaya Organisasi Dan Perilaku Etis Terhadap Kinerja Pegawai Bank Bpd Bali," *J. Cakrawala Ilm.*, vol. 3, no. 6, pp. 2021–2056, 2024.
- [4] C. H. Wasistha, "PERAN MEDIA MASSA DALAM MEMBANGUN BUDAYA ANTI KORUPSI DI MASYARAKAT," *Ius Const.*, vol. 1, no. Vol 6 No 2 : VERITAS, pp. 235–255, 2020.
- [5] U. Kristen and S. Wacana, "Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024) Tema/Edisi : Filsafat, Politik dan Etika Profesi Hukum (Bulan Kesepuluh) <https://jhlg.rewangrencang.com/>," vol. 5, no. 10, pp. 1–26, 2024.
- [6] D. Kurnia *et al.*, "PENYULUHAN UNDANG UNDANG ANTI KORUPSI DI " Awareness Campaign on Anti-Corruption Laws in the Community as an Effort to Foster a Honest and Competent Generation "," pp. 142–161.
- [7] F. Nahariah, "PENERAPAN AJARAN TURUT SERTA DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA DAN PENYALAHGUNAAN JABATAN," no. Table 10, pp. 4–6, 2024.
- [8] H. A. Mau, *PENDIDIKAN BUDAYA ANTIKORUPSI*, vol. 3, no. 1. 2024.
- [9] S. Riza and Barrulwalidin, "Peran Pendidikan Islam dalam Membangun Integritas Generasi Muda dan Mencegah Korupsi," *J. Islam. Educ.*, vol. 02, no. 01, pp. 75–87, 2024.
- [10] T. M. Anjani, A. Sani, and N. Hasanah, "Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Stabat," *J. Manaj. Bisnis Syariah*, vol. 3, no. 1, pp. 356–371, 2023.
- [11] I. A. Boitan, "Sustainable banking systems," *Uluan Silaen Wimpi Srihandoko Sinta List.*, no. 1, pp. 40–60, 2025, doi: 10.4324/9781003011132-4.
- [12] R. Rismanto, "Penerapan Esg (Environmental, Social, Governance) Dalam Strategi Investasi Keuangan," *INVESTI J. Investasi Islam*, vol. 5, no. 1, pp. 601–616, 2024,

- doi: 10.32806/ivi.v5i1.186.
- [13] S. K. Fitri, "PENGARUH KINERJA ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE (ESG) TERHADAP BIAYA UTANG (COST OF DEBT) DI INDONESIA TAHUN 2019-2023," *Ayan*, vol. 8, no. 5, p. 55, 2019.
- [14] M. Mubin, E. W. Utami, and S. A. Muhsyaf, "Tren Penelitian Implementasi Prinsip ESG dalam Praktik Akuntansi : Systematic Literature Review," *J. Sos. Ekon. Dan Hum.*, vol. 9, no. 3, pp. 377–380, 2023, doi: 10.29303/jseh.v9i3.376.
- [15] K. Parikka, "Apa itu Budaya Etis dan Mengapa Itu Penting dalam Pengungkapan Pelanggaran?," *Falcony*. 2022.
- [16] C. H. Wasistha, "PERAN MEDIA MASSA DALAM MEMBANGUN BUDAYA ANTI KORUPSI DI MASYARAKAT," *J. Ius Const.*, vol. 1, no. 2, p. 53, 2025, [Online]. Available: <https://uia.e-journal.id/veritas/article/view/1110>
- [17] T. W. Nurdiani, *Mastering the GRC-RISK-ESG Trifecta*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2025.
- [18] Amam and S. Rusdiana, "Peranan Kelembagaan Peternakan, Sebuah Eksistensi Bukan Hanya Mimpi: Ulasan dengan Metode Systematic Literature Review (SLR)," *J. Peternak.*, vol. 19, no. 1, p. 9, 2022, doi: 10.24014/jupet.v19i1.14244.
- [19] S. Triandini, E., G. W. P. Jayanatha., A. Indrawan., and B. Iswara, "Metode systematic literature review untuk identifikasi platform dan metode pengembangan sistem informasi di Indonesia," *Indones. J. Inf. Syst.*, vol. 1, no. 2, pp. 263–77, 2019.
- [20] H. Ashari and T. P. Nugrahanti, "Fraud, Etika Dan Kegagalan Bank Dari Sudut Pandang Pegawai," *J. Ris. Akunt. dan Keuang.*, vol. 9, no. 2, pp. 305–324, 2021, doi: 10.17509/jrak.v9i2.30651.
- [21] Abdul Kadir, "Peranan brainware dalam sistem informasi manajemen jurnal ekonomi dan manajemen sistem informasi," *Sist. Inf.*, vol. 1, no. September, pp. 60–69, 2020, doi: 10.31933/JEMSI.
- [22] L. Keberlanjutan, "Menyelaraskan Keuangan dan Keberlanjutan Demi Kesejahteraan Bersama," 2024.
- [23] R. Jannah and F. X. K. Tjakrawala, "ANALISIS PENERAPAN ENVIRONMENTAL , SOCIAL , AND GOVERNANCE (ESG) DALAM MENCAPAI SDGS SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA Analysis of the Implementation of Environmental , Social , and Governance (ESG) in Achieving SDGs in the Banking Sector in Indonesia," vol. 11, no. 1, pp. 49–57, 2025.
- [24] A. R. Apriliana, P. S. Manajemen, F. Ekonomi, D. Bisnis, and U. B. Lampung, "Peran Edukasi dan Pelatihan dalam Upaya Pencegahan Korupsi di Lingkungan Perbankan," no. 4, 2024.
- [25] Bank Mandiri, "Bank Mandiri Sustainability Report 2022," https://bankmandiri.co.id/documents/38265486/0/SR+Mandiri+FEB_20+FEB+23.pdf, vol. 3, pp. 1–2, 2022.